



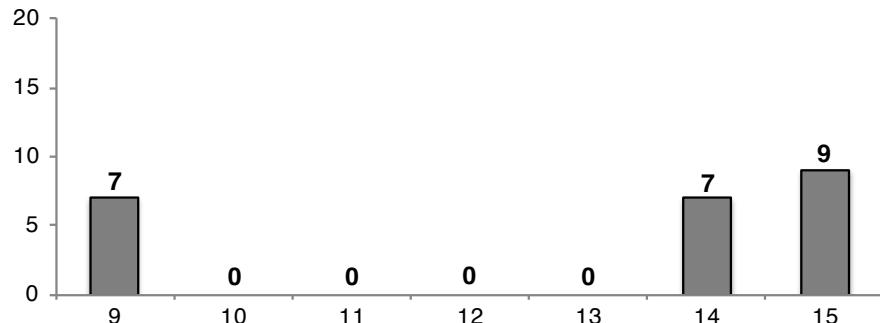
LAPORAN MEDIA CETAK

**Gubernur Jawa Tengah
(15 Mei 2025)**

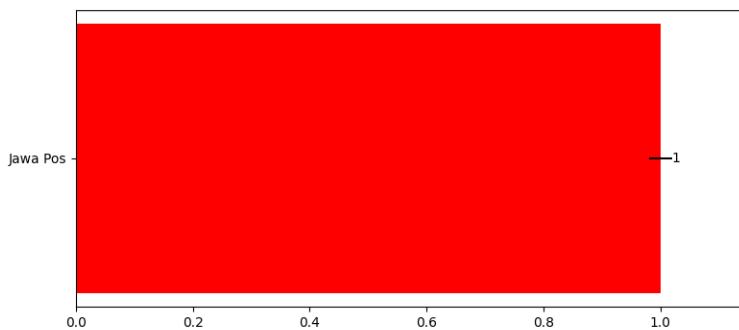
Summary

| Media | News | Positive | Neutral | Negative |
|-------|------|----------|---------|----------|
| 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |

Daily Statistic



Media Share



Influencers

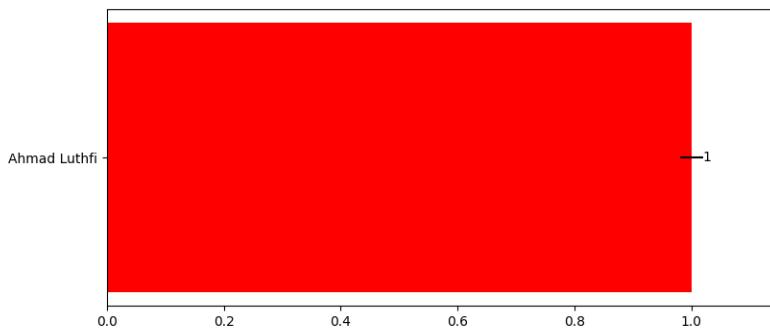


Table Of Contents : 15 Mei 2025

| No | Date | Media | News Title | Page | Sentiment | Influencers |
|----|-------------|---------------|--|------|-----------|--------------|
| 1 | 15 Mei 2025 | Jawa Pos | Pemprov Jateng Segera Bentuk Satgas Sampah | 10 | Positive | Ahmad Luthfi |
| 2 | 15 Mei 2025 | Jateng Pos | Realisasi Pendapatan Pajak Jateng Capai Rp3,77 Triliun | 1 | Positive | Ahmad Luthfi |
| 3 | 15 Mei 2025 | Jateng Pos | Pemprov Jateng Bentuk Satgal Pengelolaan Sampah | 11 | Positive | Ahmad Luthfi |
| 4 | 15 Mei 2025 | Jateng Pos | Jateng Bentuk Satgas Sampah | 11 | Positive | Ahmad Luthfi |
| 5 | 15 Mei 2025 | Jateng Pos | Pabrik Sepatu di Pati akan Serap 12.000 Pekerja | 12 | Positive | Ahmad Luthfi |
| 6 | 15 Mei 2025 | Suara Merdeka | Realisasi Pendapatan Pajak Jateng Rp 3,77 Triliun | 1 | Positive | Ahmad Luthfi |
| 7 | 15 Mei 2025 | Suara Merdeka | Gubernur Ingin targetkan Tiga Besar PON 2028 | 6 | Positive | Ahmad Luthfi |
| 8 | 15 Mei 2025 | Suara Merdeka | Jateng Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah | 9 | Positive | Ahmad Luthfi |
| 9 | 15 Mei 2025 | Suara Merdeka | 130 Hunta Dibangun Untuk Korban Tanah Gerak | 14 | Positive | Ahmad Luthfi |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|----------|
| Title | Pemprov Jateng Segera Bentuk Satgas Sampah | | |
| Media | Jawa Pos | Reporter | ant/dri |
| Date | 2025-05-15 | Tone | Positive |
| Page | 10 | PR Value | |

Pemprov Jateng Segera Bentuk Satgas Sampah

SEMARANG – Pemprov Jateng bakal membentuk satuan tugas (satgas) pengelolaan sampah. Upaya tersebut merespons target Indonesia dalam menyelesaikan masalah sampah pada 2029.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan, Jateng tidak hanya siap mengikuti arahan pemerintah pusat, tetapi juga ingin menjadi daerah terdepan.

"Jateng harus yang paling siap, paling progresif, dan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan berkelanjutan. Tidak boleh biasa-biasa saja. Kita punya kekuatan," kata mantan Kapolda Jateng itu saat rapat koordinasi (rakor) Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Jateng 2025 kemarin (14/5).

Dia menyatakan, satgas tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesiapan Jateng



TEGASKAN KOMITMEN: Ahmad Luthfi (tengah) bersama Wagub Taj Yasin (kiri) memimpin rapat koordinasi di Kota Semarang kemarin (14/5).



Jateng harus yang paling siap, paling progresif, dan menjadi contoh dalam pengelolaan sampah."

AHMAD LUTHFI
Gubernur Jateng

dalam rakor pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas pada Juni nanti. "Dalam sepekan ini, semua pihak harus bersiap membahas sampah secara serius. Ini tanggung jawab

bersama," tegasnya.

Satgas nanti tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan edukasi, supervisi lapangan, serta percepatan inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan sosial.

Luthfi juga meminta pendekatan dari hulu hingga hilir diterapkan secara konkret. Mulai pembatasan produksi sampah, edukasi pemilahan, hingga pemanfaatan kembali dalam skema ekonomi sirkular. (ant/dri)

| | | | |
|-------|--|----------|----------|
| Title | Realisasi Pendapatan Pajak Jateng Capai Rp3,77 Triliun | | |
| Media | Jateng Pos | Reporter | adv/ucl |
| Date | 2025-05-15 | Tone | Positive |
| Page | 1 | PR Value | |



Realisasi Pendapatan Pajak Jateng Capai Rp3,77 Triliun

KETERANGAN: Gubernur Ahmad Luthfi di dampingi Wagub Taj Yasin dan Sekda Sumarno, tengah memberikan keterangan media terkait realisasi pendapatan pajak Provinsi Jawa Tengah capai Rp 3,77 Triliun.

SEMARANG – Realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah hingga 30 April 2025 mencapai Rp3,77 triliun. Jumlah itu mengalami tren positif, karena persentasenya sudah sebesar 29,81 persen atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 27,79%.

Dari jumlah itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,248 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp456.650 miliar, Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan sebesar Rp874,209 miliar, dan Pajak Rokok sebesar Rp1,180 triliun.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu. Ia mengimbau agar warga tak lagi menunda kewajibannya tersebut dengan alasan menunggu program pemutihan.

"Yang ingin memanfaatkan program pemutihan (pajak), ini saya imbau masyarakat untuk segera, karena batas waktunya sampai tanggal 30 Juni. Ini menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak," ujar Luthfi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 di kantornya pada Rabu, 14 Mei 2025.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung di Jawa Tengah mencakup pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Program ini dimulai sejak 8 April hingga 30 Juni 2025.

Luthfi mengimbau agar kedepan tidak ada lagi budaya menunda-nunda membayar pajak sambil menunggu pemutihan.

"(Tahun) 2026 nanti, (masyarakat) harus (taat) bayar pajak. Karena pemutihan sebagianya kan hanya bagi mereka (kendaraan) yang sudah mati. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar," tegasnya.

Ia juga menyampaikan proses pengawasan dan penagihan pajak kendaraan bermotor akan diperkuat hingga ke level terbawah. Nantinya, tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bergerak, tapi juga pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif.

"Penagihannya nanti akan ikut dilakukan juga oleh pemerintah desa, dalam rangka menghadirkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor," tambahnya. (adv/ucl)

| | | | |
|-------|--|----------|----------|
| Title | Pemprov Jateng Bentuk Satgal Pengelolaan Sampah | | |
| Media | Jateng Pos | Reporter | ant/muz |
| Date | 2025-05-15 | Tone | Positive |
| Page | 11 | PR Value | |

Pemprov Jateng Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah



Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan, Rabu (14/5).

ISTI/PEMPROV JATENG

SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal membentuk satuan tugas (satgas) pengelolaan sampah di wilayah tersebut seiring dengan target Indonesia mencapai penyelesaian masalah sampah pada 2029.

Gubernur Jateng **Ahmad Luthfi**, di Semarang, Rabu mengatakan bahwa Jateng tidak hanya siap mengikuti arahan pemerintah pusat, tetapi ingin mengambil posisi sebagai daerah yang terdepan.

Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2025.

Menurut dia, Jateng harus menjadi daerah yang paling siap, paling progresif, dan

bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan berkelanjutan.

"Jawa Tengah tidak boleh biasa-biasa saja. Kita harus jadi yang terdepan. Kita punya kekuatan, punya model, dan saya ingin itu dikonsolidasikan lewat satgas. Jangan tunggu-tunggu lagi," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Ia menjelaskan bahwa satgas tersebut sekaligus menjadi bagian dari kesepakatan Jateng dalam menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas pada Juni 2025.

"Nanti kami bentuk satgasnya, lalu kami evaluasi. Dalam sepekan ini, semua pihak harus bersiap membahas sampah secara serius. Ini tanggung jawab bersama," katanya.

Satgas yang akan dibentuk nantinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi berperan aktif dalam memberikan edukasi, supervisi lapangan, dan percepatan inovasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan sosial.

Ia juga meminta agar pendekatan dari hulu hingga hilir diterapkan secara konkret, mulai dari pembatasan produksi sampah, edukasi pemilahan, hingga pemanfaatan kembali dalam skema ekonomi sirkular.

"Satgas ini diharapkan menjadi bukti kesiapan Jateng

untuk memimpin agenda lingkungan hidup, sekaligus mengakselerasi perubahan perilaku masyarakat menuju Indonesia bebas sampah pada 2029," katanya.

Sebelumnya, darurat sampah di Jateng merupakan persoalan yang harus segera dituntaskan dan belum lama ini telah koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas masalah darurat sampah.

Saat ini, sudah ada sejumlah inovasi pengelolaan sampah yang sudah berjalan di Jateng, seperti, pengelolaan sampah menjadi refuse derived fuel (RDF) di TPST Jeruk Legi Kabupaten Cilacap dengan kapasitas 150 ton sampah/hari, serta TPST BLE Kabupaten Banyumas menjadi RDF, paving, dan maggot.

Kemudian, pengolahan sampah menjadi PLTSa di TPA Putri Cempo Solo dengan kapasitas 450 ton/hari dan 5 MW/hari. Selanjutnya, mendorong pengelolaan sampah di sisi hulu melalui pemberian apresiasi kepada Desa Mandiri Sampah 48 desa (2023) dan 40 desa (2024) sehingga total terdapat 88 desa.

Kemudian, terobosan Pemprov Jateng dalam mengatasi masalah sampah yang telah dilakukan seperti pengolahan sampah menjadi RDF dengan dukungan AIB (Asian Infrastructure Investment Bank) di TPST Regional Magelang dengan kapasitas 200 ton/hari, termasuk di TPA Kabupaten Rembang, Temanggung, dan Jepara berkapasitas 100 ton/hari. (ant/muz)

| | | | |
|-------|-----------------------------|----------|----------|
| Title | Jateng Bentuk Satgas Sampah | | |
| Media | Jateng Pos | Reporter | jan |
| Date | 2025-05-15 | Tone | Positive |
| Page | 11 | PR Value | |

Jateng Bentuk Satgas Sampah

Jalankan Perintah Prabowo Atasi Zero Sampah 2029

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi akan membentuk satuan tugas (satgas) pengelolaan sampah di wilayahnya. Hal ini menyusul target nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia mencapai penyelesaian masalah sampah pada tahun 2029.

Menurut Luthfi, Jawa Tengah tidak hanya siap mengikuti arahan pusat, tetapi ingin mengambil posisi sebagai daerah yang paling siap, paling progresif dan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa pembentukan satgas tidak bisa ditunda, mengingat persoalan sampah di sejumlah daerah perlu segera diintervensi.

"Artinya kita harus dahului, harus bikin satgas. Kita harus punya intervensi di kabupaten/kota yang punya problem. Satgas untuk bersama menyelesaikan masalah bersama," ujar Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Anggaran 2025, di kantornya pada Rabu, 14 Mei 2025.

Luthfi menambahkan, satgas ini akan dirancang seperti tim Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di Jateng—berbasis provinsi, bekerja lintas sektor, dan memiliki waktu gerak yang cepat.

"Saya pengin (Jateng) punya role model-nya. Nanti bikin satgas kayak MBG, kita punya tim khusus, jadi



Artinya kita harus d a h u l u i , harus bikin satgas. Kita harus punya intervensi di kabupaten/kota yang punya problem. Satgas untuk bersama menyelesaikan masalah bersama

AHMAD LUTHFI
(Gubernur Jateng)



Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

HUMAS/JATENGPOS

Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam menyelesaikan langkah-langkah percepatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pembentukan satgas secara cepat bersama kabupaten/kota.

Satgas ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapannya tim Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di Jateng—berbasis provinsi, bekerja lintas sektor, dan memiliki waktu gerak yang cepat.

Menurut Luthfi, darurat sampah di Jawa Tengah adalah persoalan daerah yang sebelumnya sempat mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian LHK.

"Satgas sampah sudah disiapkan,

dan akan kami siapkan secara cepat dengan kabupaten/kota. Informasi terakhir dari Menteri LHK, akan ada rapat koordinasi sampah se-Indonesia di Banyumas sekitar bulan Juni," ujar Widi

Ia menambahkan bahwa progres di sejumlah daerah seperti Kabupaten Karanganyar sudah menunjukkan peningkatan, termasuk rencana pembangunan TPA baru dan peningkatan anggaran pengurangan.

Di sisi lain, sejumlah inovasi pengelolaan sampah juga telah dijalankan di Jawa Tengah. Di antaranya TPST Jeruklegi, Cilacap yang mengolah 150 ton sampah/

hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel). TPST BLE, Banyumas yang menghasilkan RDF, paving block, dan magot.

Kemudian TPA Putri Cempo, Solo yang mengelola 450 ton sampah/hari menjadi energi listrik melalui PLTSa berkapasitas 5 MW/hari. TPST Regional Magelang yang tengah dikembangkan dengan dukungan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), berkapasitas 200 ton/hari.

Selain itu Program pengembangan desa mandiri sampah dengan capaian 88 desa selama 2023–2024. Pengembangan pengolahan sampah di TPA Kabupaten Rembang,

Temanggung, dan Jepara, masing-masing dengan kapasitas 100 ton/hari.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mendukung langkah ini dengan menyoroti keberhasilan Kabupaten Banyumas sebagai contoh pengelolaan sampah berbasis komunitas yang berhasil dan bernilai ekonomi.

"Banyumas itu sudah bisa mandiri dalam mengelola sampahnya. Bukan ada nilai ekonominya juga. Sudah kerja sama dengan pabrik semen. Artinya ini bisa ditiru, bisa direplikasi. Tinggal bagaimana kita satukan dalam pola kerja yang terstruktur," ujar Taj Yasin. (*/jan)

| | | | |
|-------|--|----------|----------|
| Title | Pabrik Sepatu di Pati akan Serap 12.000 Pekerja | | |
| Media | Jateng Pos | Reporter | jan |
| Date | 2025-05-15 | Tone | Positive |
| Page | 12 | PR Value | |

Pabrik Sepatu di Pati akan Serap 12.000 Pekerja



Gubernur Jateng menerima perwakilan manajemen dari PT HWI di ruang kerja.

SEMARANG – Sebuah pabrik sepatu olahraga di Kabupaten Pati di bawah naungan PT Hwaseung Indonesia (HWI) bakal menyerap sebanyak 12.000 tenaga kerja baru pada 2026.

Saat ini, perusahaan asal Korea Selatan tersebut sudah memiliki sekitar 30 ribu tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 23.900 tenaga kerja di Jepara, dan sisanya di Pati.

"Untuk perekruitan karyawan kami lebih mengutamakan karyawan yang ada di sekitar HWI, seperti lepara Kudus dan Pati dan sekitarnya," kata Direktur Senior PT Hwaseung Indonesia (HWI), Lee Seol, saat audiensi dengan

Gubernur Jawa Tengah **Ahmad Luthfi**, di kantornya pada Rabu, 14 Mei 2025.

Lee Seol menyampaikan, PT Hwaseung Indonesia menanamkan investasinya di dua daerah di Jawa Tengah, yakni Jepara dan Pati. Rencana investasi di Jepara mencapai Rp1,01 triliun dan di Pati Rp2,8 triliun. Realisasi saat ini mencapai Rp693, 1 miliar di Jepara dan sebanyak Rp1,9 triliun di Pati.

Dalam pertemuan tersebut, Lee Seol menyampaikan, informasi-informasi penting terkait investasi dan pengembangan industri yang sudah dilakukan.

Di sisi lain, dia juga mendapat masukan untuk membantu menin-

gkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, utamanya pada masyarakat yang tinggal di sektor lokasi perusahaan.

"Kami juga mendapatkan permintaan untuk menjalankan CSR yang diberikan kepada desa-desa di sekitar HWI. Kami juga sudah mendengarkan soal CSR ambulans dan jambanisasi. Kami akan review dan membicarakan secara internal," tuturnya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih karena PT HWI telah berinvestasi di Jepara dan Pati. Investasi tersebut akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"Ke depan kita akan mempermu-

dah perizinan, menyiapkan sumber daya manusia, dan paling utama keamanan investasi akan kita jamin, agar pabrik dan investasi dari luar dapat berkembang lagi di wilayah kita," tuturnya saat menemu direkti

PT HWI.

Seiring dengan kemajuan PT HWI, Ahmad Luthfi berpesan agar memberikan kontribusi positifnya kepada masyarakat di sekitar perusahaan, melalui program CSR.

Bantuan yang saat ini dibutuhkan adalah perbaikan RTLH dan jambanisasi. Pihaknya juga berharap, PT HWI dapat mendukung program Dokter Spesialis Keliling (Speling) melalui bantuan mobil ambulans. (*/jan)

| | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| Title | Realisasi Pendapatan Pajak Jateng Rp 3,77 Triliun | | |
| Media | Suara Merdeka | Reporter | Ekd-56 |
| Date | 2025-05-15 | Tone | Positive |
| Page | 1 | PR Value | |

Realisasi Pendapatan Pajak Jateng Rp 3,77 Triliun

SEMARANG - Realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah hingga 30 April 2025 mencapai Rp 3,77 triliun. Jumlah itu mengalami tren positif, karena persentasenya sudah sebesar 29,81 persen atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 27,79%.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyumbang pendapatan terbesar Rp 1.248 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp 456,650 miliar, pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan sebesar Rp 874,209 miliar, dan pajak rokok sebesar Rp 1,180 triliun.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi pun menegaskan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu amat penting. Ia

mengimbau agar warga tak lagi menunda kewajiban tersebut dengan alasan menunggu program pemutihan.

"Yang ingin memanfaatkan program pemutihan (pajak), saya imbau masyarakat untuk segera karena batas waktunya sampai tanggal 30 Juni. Ini menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak," ujar **Ahmad Lutfi** saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, di kantonya, Rabu, (14/5). (39)

(Bersambung hlm 5 kol 2)

PIMPIN RAKOR : Gubernur Ahmad Lutfi memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (Rakor POK), Rabu, (14/5). (39)



SM/Eko Eddi

Realisasi...

(sambungan hlm 1)

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung di Jawa Tengah mencakup pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Program itu dimulai sejak 8 April hingga 30 Juni 2025.

Lutfi mengimbau agar ke depan tidak ada lagi budaya memundur-nunda membayar pajak sambil menunggu pemutihan.

"(Tahun) 2026 nanti, (masyarakat) harus (taat) bayar pajak, karena pemutihan seyogyanya kan hanya bagi mereka (kendaraan) yang sudah mati. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar," tegaskannya.

Ahmad Lutfi juga menyampaikan proses pengawasan dan penagihan pajak kendaraan bermotor akan diperkuat hingga ke level terbatas. Nantinya, tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bergerak, tapi juga pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif.

Penagihannya nanti akan ikut dilakukan juga oleh pemerintah desa, dalam rangka menghadirkan pener-

maan dari pajak kendaraan bermotor; tambahnya.

Warga Antusias

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai 8 April hingga 30 Juni 2025 bertujuan untuk meredam beban masyarakat dan meningkatkan ketepatan wajib pajak.

Kebijakan Gubernur membebaskan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) disambut antusiasme warga.

Buktinya pencapaian PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Jawa Tengah tahun 2025 tercatat sampai 30 April mencapai Rp 1.248 triliun. Jumlah itu merupakan bagian dari total realisasi pendapatan pajak daerah yang mencapai Rp 3,77 triliun.

Peningkatan itu berasal dari antusiasme warga yang membayar pajak, berkat adanya program pembebasan tunggakan dan denda pajak tersebut. Bahkan, ada tunggakan pajak yang sampai tiga tahun, lima tahun, dan sepuluh tahun, kini terbayar lunas.

Dengan adanya program ini, PAD dari sektor tersebut diperkirakan akan terus bertambah, lanjutan program ini masih berlanjut hingga 30 Juni 2025.

Apalagi, pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 di Provinsi Jawa Tengah itu terdiri dari berbagai

kerigangan. Masyarakat bisa mendapatkan penghapusan semua denda dan pokok tunggakan, plus denda tunggakan jasa raja. Pemprov Jateng menghapus pokok pajak dan denda bagi pemilik kendaraan yang menunggak di tahun-tahun sebelumnya. Warga hanya diwajibkan membayar pajak berjalan tahun 2025.

Menurut Lutfi program itu bukan semata untuk mendongkrak PAD, melainkan untuk meningkatkan kesadaran warga agar membayarkan pajak kendaraan bermotor. Sehingga, ke depan lebih terbit dalam membayar baik secara online, maupun datang langsung di gerai Samsat.

Lutfi menegaskan, pajak kendaraan yang masuk ke PAD akan dikembalikan kepada masyarakat. Bentuknya adalah pembangunan sarana prasarana untuk kenyamanan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, hingga mendukung swasembada pangan di Jateng.

Ilni jadi semacam euforia bagi masyarakat. Satu sisi PAD pemprov dan kabupaten/ kota lebih bagus, secara tak langsung akan menambah pembangunan sarana prasarana di wilayah masing-masing," ucap Lutfi.

Sebelumnya, tunggakan dan piutang PKB di Jawa Tengah tahun 2025 mencapai Rp 2,8 triliun.(ekd-56)

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------|
| Title | Gubernur Ingin targetkan Tiga Besar PON 2028 | | |
| Media | Suara Merdeka | Reporter | H85,A4-67 |
| Date | 2025-05-15 | Tone | Positive |
| Page | 6 | PR Value | |

Gubernur Ingin Targetkan Tiga Besar PON 2028



SM/dok

FOTO BERSAMA: Jajaran pengurus KONI Jawa Tengah berfoto bersama dengan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi (lima kiri) usai beraudiensi di Kantor Gubernur Jateng Jl Pahlawan, Rabu (14/5). (67)

SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menerangkan serius mendukung upaya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Tengah untuk mencapai posisi tiga besar pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB-NTT 2028 mendatang. Hal itu disampaikan saat audiensi dengan jajaran pengurus KONI Jateng di

ruang kerja Gubernur Jateng, Rabu (14/5).

Gubernur menerima masukan KONI Jateng terkait persiapan kesiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVII/2026 di Semarang Raya. Ajang ini akan jadi persiapan atlet serta seluruh kontingen untuk berlaga di PON XXII 2028.

"Potensi Jateng atletnya bagus, bisa dieksplorasi. Terimakasih. Nanti evaluasi

anggarannya (Porprov), prindip kami dukung. Semua harus dipersiapkan secara matang dan terukur. Atlet Jateng punya potensi yang sangat bagus," kata Luthfi.

Ketua KONI Jateng, Bona Ventura Sulistiana, mengatakan, akan serius dalam menyiapkan atlet di Porprov XVII/2026 di Semarang Raya untuk menuju PON 2028. "Saya berharap PON mendatang capiaian meningkat. Selama kita serius dan tidak jeda jeda melakukan pembinaan, saya rasa target ke depan bisa dicapai. Kalau bisa masuk tiga besar," kata dia.

Bona merincikan, bila target itu punya landasan atas capaian pada PON XXI Aceh-Sumut. Kontingen Jateng merebut posisi lima besar dengan capaian 71 emas, 74 perak, 115 perunggu. Capaian ini menjadi yang terbaik selama keikutsertaan Jateng.

Pihaknya memerinci dari 60 cabang olahraga (cabor) hanya tiga cabang yang gagal menyumbang medali untuk provinsi ini. Kemudian ada empat cabor yang menjadi juara umum, yakni bulutangkis, sepak takraw, parlayang, dan woodball.

Penantapan Atlet

Hasil itu, lanjut Bona, juga didasarkan pada pemantapan atlet melalui perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jateng XVI/2023 Pati Raya. Maka dari itu, lanjut dia, KONI Jateng akan memaksimalkan perhelatan Porprov XVII/2026 di Semarang Raya untuk PON 2028.

"Persiapan Porprov 2026 di Semarang Raya. Ini bukan perhelatan biasa, tapi untuk menuju PON, karena kalau tak dimulai persiapanya sejak awal, nanti kita di PON akan kaget," katanya. Bona meminta dukungan dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi untuk penyelenggaraan Porprov tahun depan.

Dukungan yang dimaksud juga dari sisi penambahan anggaran dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jateng. Diungkapkan, rencana anggaran awal Rp45 miliar untuk Porprov dalam rangka persiapan PON 2028. "Dan saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Luthfi. Apalagi tadinya Ketua Pengprov PBVSL Respon beliau demikian (bagus)," "kata Bona.(H85,A4-67)

| | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|
| Title | Jateng Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah | | |
| Media | Suara Merdeka | Reporter | ekd-44 |
| Date | 2025-05-15 | Tone | Positive |
| Page | 9 | PR Value | |



SATGAS SAMPAH: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin dan Sekda Sumarno memberikan keterangan soal pembentukan satgas sampah, Rabu (14/4). (44)

Jateng Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah

SEMARANG - Gubernur Jawa

Tengah Ahmad Luthfi akan membentuk satuan tugas (satgas) pengelolaan sampah. Hal itu selaras dengan target nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia mencapai penyelesaian masalah sampah pada 2029.

Menurut Luthfi, Jawa Tengah tidak hanya siap mengikuti arahan pusat, tetapi ingin mengambil posisi sebagai daerah yang paling siap, paling progresif, dan bisa menjadi contoh dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan berkelanjutan.

Dia menegaskan bahwa pembentukan satgas tidak bisa ditunda, mengingat persoalan sampah di sejumlah daerah perlu segera diintervensi.

"Artinya kita harus dahulu, harus bikin satgas. Kita harus punya intervensi di kabupaten/kota yang punya problem. Satgas untuk bersama menyelesaikan masalah bersama," kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) di kantormya, Rabu (14/5). Rapat ini membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Luthfi menambahkan, satgas ini akan dirancang seperti tim Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan di Jateng. Tim ini bekerja berbasis provinsi, bekerja lintas sektor, dan memiliki waktu gerak yang cepat.

Inovasi

"Saya pengin (Jateng) punya *role model*-nya. Nanti bikin satgas kayak MBG, kita punya tim khusus, jadi kita punya tim provinsi khusus sampah. Kita akhirnya, dalam waktu dua minggu harus punya *role model* untuk kabupaten/kota," tegasknya.

Satgas itu sekaligus menjadi bagian dari kesiapan Jawa Tengah dalam menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah se-Indonesia yang direncanakan akan digelar di Kabupaten Banyumas pada

Juni mendatang.

Menurut Luthfi, darurat sampah di Jawa Tengah adalah persoalan yang harus segera dituntaskan. Dia mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dalam menyusun langkah-langkah percepatan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah Widi Hartanto menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pembentukan satgas secara cepat bersama kabupaten/kota.

DLHK juga telah melakukan pembinaan terhadap daerah-daerah yang sebelumnya sempat mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian LHK. "Satgas sampah sudah disiapkan, dan akan kami siapkan secara cepat dengan kabupaten/kota. Informasi terakhir dari Menteri LHK, akan ada rapat koordinasi sampah se-Indonesia di Banyumas sekitar bulan Juni," ujar Widi.

Dia menambahkan, progres di sejumlah daerah seperti Kabupaten Karanganyar sudah menunjukkan peningkatan, termasuk rencana pembangunan TPA baru dan peningkatan anggaran pengurangan.

Di sisi lain, sejumlah inovasi pengelolaan sampah juga telah dijalankan di Jawa Tengah. Di antaranya TPST Jerukdegi, Cilacap yang mengolah 150 ton sampah/hari menjadi RDF (Refuse Derived Fuel). Selain itu ada TPST BLE Banyumas yang menghasilkan RDF, paving block, dan magot. (ekd-44)



| | | | |
|-------|---|----------|----------|
| Title | 130 Huntara Dibangun Untuk Korban Tanah Gerak | | |
| Media | Suara Merdeka | Reporter | H51-26 |
| Date | 2025-05-15 | Tone | Positive |
| Page | 14 | PR Value | |



SM/dok

PEMBANGUNAN HUNTARA : Pembangunan huntau warga terdampak tanah gerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Brebes.(26)

130 Huntara Dibangun untuk Korban Tanah Gerak

BUMIAYU - Pembangunan hunian sementara (huntau) bagi warga terdampak tanah gerak di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Brebes, terus berlangsung.

Pemerintah menargetkan penyelesaian konstruksi pada pertengahan Mei ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kades Mendala Muhammad Basori mengatakan, huntau dibangun di atas lahan milik desa, tepat di depan kantor desa. Sebanyak 130

unit huntau disiapkan, masing-masing berukuran 3 meter x 6 meter. Tiap unit terdiri atas satu kamar tidur dan ruang keluarga. Fasilitas dapat mandi, cuci, kakus (MCK) akan dibangun terpisah per blok.

Konstruksi huntau menggunakan rangka baja ringan, atap gal-

valum, dinding calsiboard, dan lantai semen. "Huntau ini menjadi tempat tinggal sementara warga terdampak sebelum relokasi permanen," ujar Basori, kemarin.

Bencana tanah gerak yang terjadi sebelumnya menyebabkan 569 warga terdampak, dengan 444 jiwa di antaranya mengungsi. Sebanyak 120 rumah rusak berat dan 15 lainnya rusak sedang. Selain permukiman, lahan pertanian dan akses jalan juga terdampak.

Pembangunan huntau ditargetkan rampung pada 16 Mei, sesuai rencana Pemerintah Kabupaten

Brebes. Saat meninjau lokasi bersama Gubernur Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menyampaikan bahwa warga di tenda pengungsian akan mulai dipindahkan ke huntau pada pertengahan bulan ini.

Basori menambahkan, pembangunan huntau ini diharapkan menjadi titik awal pemuliharaan warga sebelum mereka menempati hunian tetap di lokasi relokasi, yang masih menunggu penetapan dari Badan Geologi.(H51-26)